

Menelisik Tumbangnya Koalisi Pemerintah di Malaysia

Penulis: Marlin Dinamikanto

11 Mei 2018

<https://nusantara.news/menelisik-tumbangnya-koalisi-pemerintah-di-malaysia/>



Mahathir Mohamad dan para pimpinan partai yang bergabung dalam Pakatan Harapan tampak merayakan kemenangan/ Foto STJ

Nusantara.news, Kuala Lumpur - Tragis, Barisan Nasional (BN) sebagai koalisi resmi pendukung pemerintah yang pada pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya meraih 133 kursi, kini hanya meraih 79 kursi. Ini adalah kekalahan pertama koalisi pendukung pemerintah sejak Malaysia merdeka dari Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957.

Sebaliknya, Pakatan Harapan (*Alliance of Hope*) membuat jalanan di beberapa kota besar Malaysia tampak bergairah setelah koalisi dari 4 partai oposisi yang dipimpin Mahathir Mohamad meraih 113 kursi - atau lebih dari satu kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Suasana ceria juga terjadi di Sarawak dan Sabah - dua negara bagian yang berlokasi di Pulau Kalimantan.

Tidak Terdeteksi

Memang, Pakatan Harapan telah menjalin kontrak politik akan memulihkan perjanjian ketika dua negara bagian itu bergabung ke Malaysia pada tahun 1963. Kala itu kedua negara bagian di Kalimantan Utara itu dijanjikan otonomi keuangan dan politik yang membedakannya dengan wilayah Semenanjung.

Sebagaimana dilaporkan Max Walden - koresponden wilayah *Asia Strait Times Journal* - kontrak politik itu menjadi satu di antara penyebab kekalahan BN pada Pemilu 9 Mei 2018

kemarin. Penyebab kekalahan lainnya adalah kasus korupsi, ketergantungannya kepada China, pengenaan pajak barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenal di Malaysia, dan dukungan BN terhadap tuntutan kelompok Islam garis keras yang memperjuangkan aspirasi politiknya lewat Partai Islam se-Malaysia (PAS).

"Mahathir telah membuktikan tekadnya untuk mencapai tujuan, menerima keterbatasan masa lalunya, meminta maaf dan mengorbankan waktu dan energinya untuk rakyat dan negara," tulis Anwar Ibrahim dari terali besi pada malam menjelang pemilu ke-14 di negaranya itu.



Pendukung Oposisi meluapkan kegembiraan saat Pakatan Harapan diumumkan meraih 113 kursi di parlemen/ Foto STJ

Pernyataan Anwar Ibrahim tampaknya sejalan dengan kebanyakan warga negara Malaysia yang memiliki hak pilih. Hasil pemilu yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum Malaysia berhasil menempatkan ke-4 partai pendukung oposisi yang bergabung dalam Pakatan Harapan di bawah kepemimpinan Mahathir berhasil "mengusir" BN dari pemerintahan setelah bercokol di sana selama 61 tahun - termasuk periode 22 tahun saat Mahathir Mohamad menjabat perdana menteri (1981 - 2003).

Berdasarkan penghitungan KPU Malaysia, Pakatan Harapan telah meraih 113 kursi di Dewan Perwakilan. Sedangkan BN - saat berita diumumkan - baru meraih 79 kursi. PAS yang cenderung ke BN apabila kedua koalisi yang bertikai gagal meraih kursi mayoritas juga mengalami peningkatan jumlah kursi menjadi 18 dari sebelumnya hanya 14. Kursi yang sudah dihitung mencapai 210 kursi dan masih ada 12 kursi lagi yang belum dihitung. Pakatan Harapan sendiri mengklaim secara keseluruhan meraih 122 kursi.



Pilihan pemilih tidak terdeteksi hingga hari pencoblosan. Survei mengunggulkan BN

Kemenangan Pakatan Harapan, ungkap Amrita Malhi - peneliti politik dari *Australian National University (ANU)* - karena adanya perubahan besar dalam sistem politik yang sebelumnya dirancang untuk menghambat oposisi kini berlangsung lebih terbuka setelah diterjang gelombang penentangan dari masyarakat Malaysia secara besar-besaran.

"Para pemilih sangat berhati-hati menyampaikan niat mereka untuk memilih apa. Gelombang perlawanan ini menjadi sulit terdeteksi. Hingga malam menjelang pemilihan, BN masih unggul di sejumlah survei. Namun mereka telah memberikan hasil yang sangat menentukan bagi karir politik Mahathir Mohamad untuk kembali membentuk pemerintahan yang baru," tuturnya.

Aaron Connelly, Rekan Peneliti di *Lowy Institute* di Sydney menulis di *Twitter* bahwa: "Hanya tiga pemerintah Asia Tenggara lainnya yang kalah dalam pemilihan sejak pergantian abad (Indonesia 2004, Thailand 2010, Myanmar 2015), dan tidak satu pun dari kekalahan itu tidak terduga. Hasil dari Pemilu Malaysia 2018 ini seperti gempa bumi."

Janji Politik

Peta Jalan pemerintahan Pakatan Harapan tertuang pada Manifesto setelah 194 halaman, berisi 10 janji politik selama 100 hari pertamanya. Di antara janji itu terdapat penghapusan pajak barang dan jasa (*GST/ Goods and Services Tax*) yang tidak populer di Malaysia serta mengenakan kembali subsidi bahan bakar yang dicabut oleh pemerintahan Najib Razak pada tahun 2014.

Janji langsung lainnya termasuk meninjau proyek infrastruktur besar yang diberikan kepada perusahaan asing dan meningkatkan upah minimum nasional menjadi 1.500 ringgit Malaysia (\$370 atau Rp5.180.000) per bulan dari 1000 ringgit saat ini.

Tidak kalah menarik lagi adalah janji membentuk Komisi Kerajaan untuk menyelidiki dugaan korupsi Najib Razak terkait dugaan kasus korupsinya di 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan dugaan korupsi lainnya yang dilakukan petinggi BN. Toh demikian, pada Rabu (9/3) malam, Mahathir membantah sebagai balas dendam politik. "Semua yang kami inginkan adalah mengembalikan aturan hukum,"ujarnya sebagaimana dikutip dari BBC.

Dalam sebuah analisisnya, Direktur *Australian National University (ANU) Malaysia Institute* Ross Tapsell mengulas, Mahathir berhasil membangun persepsi di kalangan pemilih yang mengaitkan GST dan meningkatnya biaya hidup di bawah era kepemimpinan Najib, serta maraknya korupsi serta gaya hidup mewah istri Najib. "Warga yang berbagi materi di Facebook juga memainkan peran yang tak kalah penting,"ulas Ross.



Dikalahkan sang mentor/ Foto BBC

"Secara politik, oposisi berinvestasi dalam kampanye yang kuat, pertama dengan menggabungkan kekuatan dengan Mahathir, dan kemudian dengan menyatukan cerita baru bangsa," timpal Malhi. "(Dalam narasi ini) orang-orang multi-rasial, di bawah tekanan karena upah rendah dan biaya hidup yang meningkat, datang bersama-sama untuk mengalahkan seorang pemimpin korup yang utang 1MDB-nya telah menyebabkan dia menggadaikan kedaulatan Malaysia ke China."

Selama lima tahun akan berkuasa di pemerintahan, PH telah menjanjikan pencapaian luas lainnya seperti "meringankan beban rakyat" dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi "adil dan jujur."

Program yang dijanjikan koalisi oposisi lainnya adalah membangun perumahan dengan harga terjangkau, mengurangi tol jalan raya dan mendedikasikan anggaran infrastruktur ke negara-negara bagian termiskin seperti Kelantan, Terengganu, Perlis, Sarawak dan Sabah adalah komitmen kebijakan terhadap tujuan-tujuan ini.

Pakatan harapan juga berkomitmen untuk memulihkan negara bagian Sarawak dan Sabah di bagian timur Malaysia ke status mereka berdasarkan Perjanjian Malaysia tahun 1963,

dengan demikian melestarikan otonomi keuangan dan politik relatif mereka dari Semenanjung.

Sementara BN dikatakan telah menimbulkan kontroversi dengan memperkenalkan RUU Hudud yang kontroversial untuk meningkatkan kekuatan pengadilan Syariah sebagaimana yang diminta oleh partai PAS Islamis, Pakatan Harapan juga berkomitmen menghapuskan hukuman mati wajib dan Undang-Undang Penghasutan yang berlaku sejak zaman colonial.

Kendati Mahathir dianggap otoriter selama 22 tahun berkuasa, Mahathir tetap bersikap kritis terhadap fundamentalisme Islam dan membandingkan PAS dengan Taliban. Partainya telah berjanji untuk memulihkan Malaysia sebagai pemimpin Islam "moderat."

Apabila ditelisik, penyebab kekalahan BN adalah maraknya korupsi yang diduga dilakukan oleh Najib Razak, penenaan pajak barang dan jasa serta pencabutan subsidi BBM yang membuat kehidupan rakyat makin sengsara, rendahnya upah minimal regional, ketergantungan pemerintah kepada China, tidak ditepatinya perjanjian dengan Sarawak dan Sabah, serta menguatnya pengaruh Islam garis keras dalam kebijakan politiknya yang mengancam keberagaman Malaysia. []